



PERAN KLINIK UMKM DI KABUPATEN JEMBER

The Role of Clinical Micro Small-Middle Bussines in Jember Regiont

SKRIPSI

Oleh

Debby Carlynda Cahya Illahi

NIM 120910201075

**PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



PERAN KLINIK UMKM DI KABUPATEN JEMBER

The Role of Clinical Micro Small-Middle Bussines in Jember Regiont

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Debby Carlynda Cahya Illahi

NIM 120910201075

**PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

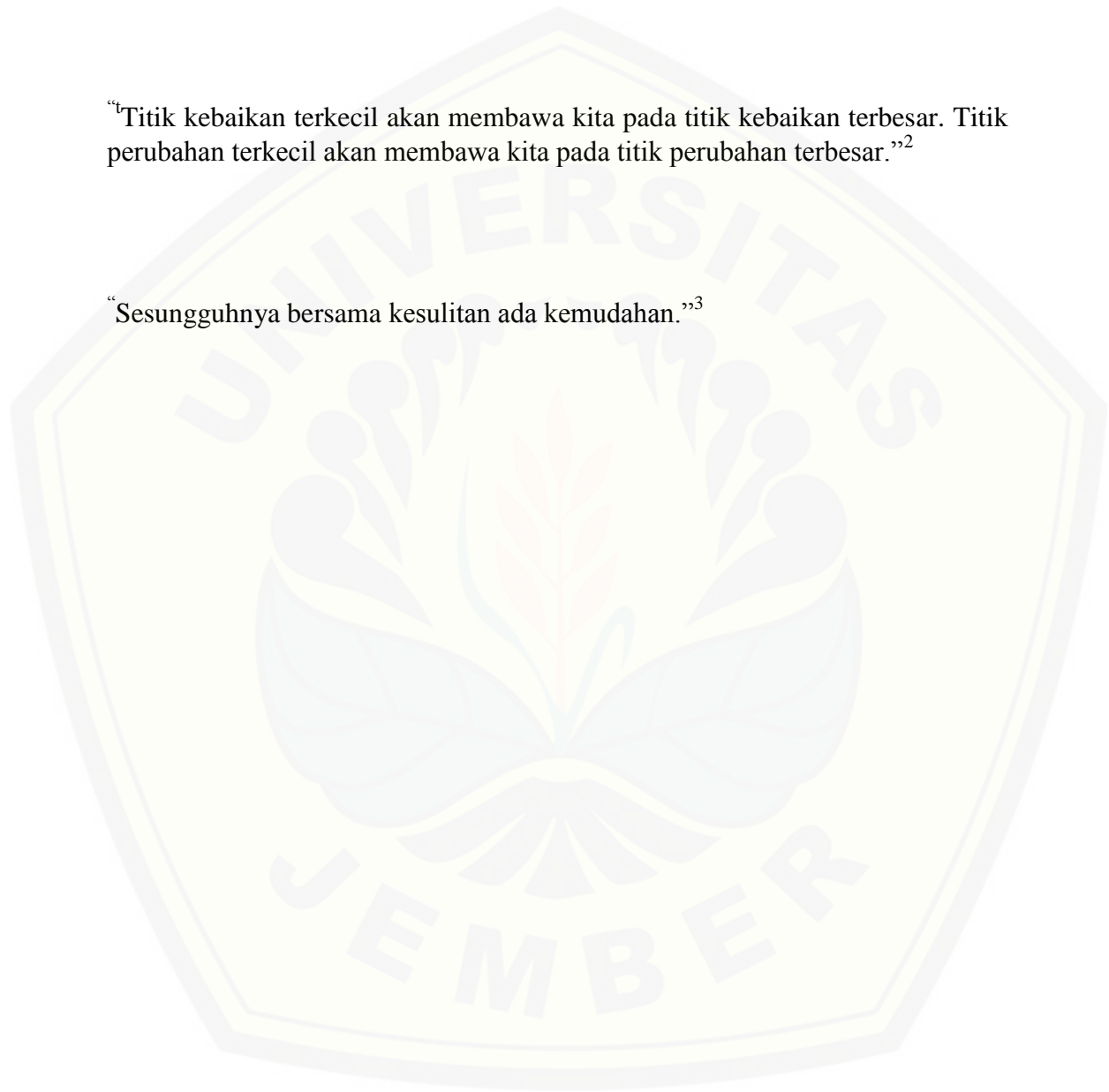
1. Ibunda Farida dan Ayahanda Hendra tercinta yang sangat ananda hormati, dan ananda sayangi, tiada langkah dalam hidup ananda tanpa iringan doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti diberikan pada ananda;
2. Kakakku Nick Fahrizal Augusta, adikku Adelia Nurdana Faizah dan Fazel Rui Dsyazilli yang senantiasa memberikan dukungan serta doa;
3. Semua guru-guruku, mulai dari TK Trisula, SDK Yanto Yoseph, SMPN 05 Lumajang, SMAN 03 Lumajang, hingga Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang sangat berharga;
4. Almamaterku, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

MOTO

“Success is going from failure to failure without losing enthusiasm”¹

“Titik kebaikan terkecil akan membawa kita pada titik kebaikan terbesar. Titik perubahan terkecil akan membawa kita pada titik perubahan terbesar.”²

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”³



¹Winston Churchill

² Aldilla Dharma Wijaya

³ QS 94:6



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Debby Carlynda Cahya Illahi

NIM : 120910201075

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Juni 2017

Yang menyatakan,

Debby Carlynda Cahya Illahi

NIM 120910201075

SKRIPSI

PERAN KLINIK UMKM DI KABUPATEN JEMBER

The Role of Clinical Micro Small-Middle Bussines in Jember Region

Oleh

Debby Carlynda Cahya Illahi

NIM 120910201075

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Boedijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember” karya Debby Carlynda Cahya Illahi telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 29 Agustus 2017.

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Inti Wasiati, MM

NIP 195307311980022001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP 195805101987022001

Anggota Tim Penguji:

1. Selfi Budi H, S.Sos, M.Si ()
NIP 197003221995122001
2. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP ()
NIP 197410072000121000

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Klinik UMKM Di Kabupaten Jember; Debby Carlynda Cahya Illahi, 120910201075; 2017: halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember khususnya pelaku UMKM yang dibina di Klinik UMKM Kabupaten Jember dan mendeskripsikan pelaksanaan layanan Klinik UMKM dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku UKM, berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah peran Klinik UMKM terhadap pelaku UMKM binaan yang ada di Kabupaten Jember.

Klinik UMKM merupakan program yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/ 133/ KPTS/ 013/ 2008 tentang Lembaga Klinik Usaha Kecil dan Menengah Jawa Timur yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku UKM melalui serangkaian pembinaan profesional yang tangguh. Klinik UMKM tersebar di beberapa kabupaten salah satunya terdapat di Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaan program Klinik UMKM di dampingi oleh Consultant Bussines Development Services (BDS) atau pendamping UKM. Tugas dari Consultant Bussines Development Services (BDS) yaitu melayani, menjembatani kebutuhan, memotivasi melalui layanan-layanan yang ada di Klinik UMKM Kabupaten Jember.

Pelaku UKM yang terdapat di Kabupaten Jember mengalami permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala klasik pelaku UKM. Keterbatasan modal usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, kurangnya informasi terkait pemasaran,

kurangnya inovasi produk dan masih banyak yang lainnya. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku UKM di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mengadopsi program kebijakan Klinik UMKM yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Dibentuklah Klinik UMKM Kabupaten Jember yang diharapkan mampu mengatasi dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang di hadapi pelaku UKM di Kabupaten Jember melalui layanan-layanan yang terdapat di Klinik UMKM.

Layanan-layanan yang disediakan di Klinik UMKM Kabupaten Jember terdiri dari empat layanan yaitu,

1. Layanan Konsultasi dan Informasi bisnis;
2. Layanan Mediasi Permodalan, Layanan Perijinan dan Advokasi;
3. Layanan *Short Course* (training);
4. Layanan Sertipikat Massal Swadaya (SMS);

Layanan yang terdapat di Klinik UMKM Kabupaten Jember tersebut dapat diakses oleh pelaku UKM maupun masyarakat yang memiliki rencana untuk membuka suatu usaha atau bisnis. Layanan tersebut diharapkan mampu memberdayakan dan mengembangkan UKM serta mampu meningkatkan kualitas dari pelaku UKM yang ada di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pelaku UKM khususnya pelaku UKM yang menjadi binaan di Klinik UMKM Kabupaten Jember mengalami peningkatan dari segi ekonomi maupun kualitas UKM.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisis data dengan melihat empat tipe dampak program menurut Langbein. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan oleh pelaku UKM binaan Klinik UMKM

Kabupaten Jember menimbulkan dampak pada segi ekonomi dan kualitas kehidupan pelaku UKM.

Pelaku UKM yang sebelumnya tidak mendapatkan pembinaan di Klinik UMKM dan sesudah mendapatkan binaan mengalami perubahan dalam segi ekonomi maupun kualitas. Pelaku UKM yang telah mendapatkan pembinaan dan mengakses layanan-layanan yang terdapat di Klinik UMKM merasakan dampak dari layanan tersebut. Pelaku UKM binaan yang menjadi informan penelitian merasakan dampak positif dari program Klinik UMKM. Dapat dilihat pelaku UKM yang menjadi informan mengalami kenaikan pendapatan, memiliki legalitas usaha berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), serta manajemen keuangan yang tertata dengan baik (*bankable*).

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini menyadari berbagai hambatan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Drs. Boedijono, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Anwar M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan saran mengenai akademik selama saya menjadi mahasiswa baru sampai lulus sekarang ini;
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember;
7. Bapak Agus, selaku sie Keuangan UKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember, yang telah membantu dalam proses penelitian.

8. Drs. Lukman Ekana Putra, Psi, M.Si, selaku *Consultant Bussines Development Services* (BDS), yang telah membantu dalam proses penelitian.
10. Sahabatku Indah Kurnia Wati, Rosena Mardliah, Rose Diana Rahmalia, Farah Zairina, dan Wiga Wahyuningtyas, Susi Irmawati, Irawati, Ningria Arum Sari yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah berbagi suka dan duka bersama.
11. Keluarga Ginger, Rose Diana Rahmalia, Sufriantoro Djoeharto, Dwi Nurdiyanto yang selalu memberikan doa, semangat serta pengalaman hidup yang tidak ternilai.
12. Teman sekamarku, Laelatul Saputri yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dan berbagi suka dan duka dalam melewati perkuliahan ini
13. Seluruh pihak yang tidak disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penulisan skripsi ini.

Jember, 03 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
RINGKASAN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Manfaat	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Ilmu Administrasi Negara	14
2.1.1 Pengertian Ilmu Administrasi.	14
2.2 Konsep Organisasi	17
2.3 Peran	20
2.3.1 Peran Pemerintah	22
2.3.2 Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember	24

2.4 UMKM	28
2.4.1 Pengertian UMKM.....	28
BAB 3. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.3 Data dan Sumber Data	34
3.4 Penentuan Informan Penelitian	35
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data	41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	45
4.1.1 Peta, Letak Geografis, dan Keadaan Kabupaten Jember	45
4.1.2 Kondisi Pemerintahan.....	46
4.1.3 Demografi	48
4.1.4 Pendidikan.....	48
4.1.5 Kondisi Sosial Ekonomi.....	49
4.1.6 Agama.....	49
4.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember	50
4.2.1 Latar Belakang Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember.....	50
4.2.2 Visi dan Misi.....	51
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	53
4.2.4 Struktur Organisasi.....	53
4.2.5 Kedudukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember.....	54

4.2.6 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember.....	55
4.3 Gambaran Umum Utama Bhakti Consultant.....	56
4.3.1 Profil Utama Bhakti Consultant.....	57
4.3.2 Sasaran Program Klinik UMKM.....	58
4.3.3 Program Klinik UMKM Kabupaten Jember.....	58
4.3.4 Aspek Layanan Program Klinik UMKM Kabupaten Jember.....	59
4.3.5 Tugas dan Fungsi Consultant Bussines Development Services.....	60
4.3.6 Struktur Organisasi Utama Bhakti Consultant.....	62
4.4 Hasil dan Pembahasan Penelitian Mengenai Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember	62
4.4.1 Alur Pelayanan Klinik UMKM di Kabupaten Jember.....	66
4.4.2 Kondisi Pelaku UKM Sebelum Dibina di Klinik UMKM	67
4.4.3 Pelaksanaan Layanan Klinik UMKM Terhadap Pelaku UKM Sasaran.....	73
4.5 Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember	78
4.6 Analisis Peran Klinik UMKM	84
4.6.1 Analisis Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember	85
BAB 5. PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN..... 93



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 UMKM Binaan Klinik UMKM Kabupaten Jember.....	5
1.2 Permasalahan UMKM Binaan Klinik UMKM Kabupaten Jember 2016	8
4.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jember	47
4.2 Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi 2011-2015 Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jember.....	48
4.3 UMKM Binaan Klinik UMKM Kabupaten Jember.....	64
4.4 Profil UMKM Sasaran	68
4.5 Kenaikan Pendapatan Pelaku UMKM	80
4.6 Pelaku UMKM yang Memiliki SKU	81
4.7 Manajemen Keuangan Pelaku UKM	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Frekuensi dan Prosentase Masalah UMKM.....	7
4.1.1 Peta Infrastruktur Indonesia Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.....	45
4.2.6 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember.....	55
4.3.6 Struktur Organisasi UBC	62
4.7 Surat Keterangan Usaha (SKU)	82

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi Publik menurut Dwight Waldo (1984:17) adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2004:3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Fokus dalam administrasi publik adalah teori organisasi dan manajemen. Organisasi publik menurut Ndraha (2005:18), organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan civil.

Organisasi publik bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada profit/laba. Salah satu bentuk organisasi publik yang ada di Indonesia didirikan oleh Dinas Koperasi Jawa Timur yaitu Klinik Koperasi dan UMKM.

Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur merupakan program yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/ 133/ KPTS/013/ 2008 tentang Lembaga Klinik Usaha Kecil dan Menengah Jawa Timur yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Maret 2008 didirikanlah Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami pengusaha kecil dan koperasi melalui serangkaian pembinaan profesional dan tangguh.

Klinik UMKM dibentuk sejak tahun 2008 yang dimulai di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Keterbatasan para pelaku UKM yang tersebar di beberapa wilayah menjadi awal mula dibentuknya Klinik UMKM di setiap Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terdapat Klinik UMKM adalah Kabupaten Jember. Klinik UMKM di Kabupaten Jember telah dimulai sejak tahun 2009 dan masih diimplementasikan hingga tahun 2013. Klinik UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember hanya bertahan hingga tahun 2013 dan dilanjutkan oleh Utama Bhakti Consultant selaku lembaga profesional yang bergerak di bidang jasa konsultan dan aktif hingga tahun 2017.

Setiap Klinik UMKM di Kabupaten memiliki pendamping UMKM dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan praktisi yang berpengalaman di bidangnya dalam mobilisasi. *Consultant Business Development Services (BDS)* atau pendamping UMKM adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasehat ahli tertentu yang menjalin relasi dengan masyarakat dalam memberikan motivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dan masalah UKM. Bapak Lukman Ekana Putra selaku konsultan BDS/pendamping UMKM di Kabupaten Jember yang berperan dalam menjalankan tugas sebagai konsultan bisnis dalam melaksanakan layanan-layanan yang terdapat di Klinik UMKM.

Dalam pelaksanaan layanan-layanan Klinik UMKM bertempat di Utama Bhakti Consultant (UBC). Klinik UMKM Kabupaten Jember memiliki beberapa layanan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lukman yang menyatakan,

“Layanan konsultasi dan informasi bisnis merupakan layanan yang diberikan pada pelaku usaha yang melakukan konsultasi mengenai perencanaan atau permasalahan yang terkait bisnis tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya, layanan mediasi permodalan merupakan layanan pengajuan modal pada perbankan oleh pelaku usaha yang dibantu oleh BDS dalam

pembuatan proposal hingga mediasi dengan perbankan. Selain itu BDS juga membantu UMKM yang belum memiliki legalitas dengan membantu dalam pembuatan profil usaha hampir semua UMKM kini sudah memiliki SKU atau Surat Keterangan Usaha.” (4 Februari 2017)

Program layanan yang terdapat di Klinik UMKM di Kabupaten Jember mengadopsi dari program layanan Klinik UMKM Jawa Timur. Program layanan yang diberikan dalam Program Klinik UMKM di Kabupaten Jember meliputi layanan konsultasi dan informasi bisnis, layanan mediasi permodalan, layanan perijinan dan advokasi, layanan short course (training), layanan Sertifikat Massal Swadaya (SMS). Layanan-layanan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Layanan Konsultasi dan Informasi Bisnis

Merupakan layanan konsultasi secara personal antara konsultan dengan pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM dengan tujuan untuk menemukan masalah yang dihadapi. Konsultan akan membimbing untuk menemukan masalah dan mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang ada sedangkan layanan informasi bisnis diberikan untuk membantu mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pelaku UMKM seperti data base bahan baku, produk perbankan, peluang ekspor, kemitraan, pemasaran, program pemerintah dan lain-lain.

2. Layanan Mediasi Permodalan, Layanan Perijinan dan Advokasi;

Layanan mediasi permodalan merupakan pemberian layanan di bidang permodalan, memberikan informasi kredit, selanjutnya pelaku UMKM diarahkan ke perbankan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, mendampingi pengajuan, presentasi dan negosiasi kredit sedangkan layanan perijinan dan advokasi merupakan layanan yang diberikan kepada pelaku UMKM yang belum mampu melakukan sendiri aktivitasnya misalnya pembuatan laporan keuangan, pengurusan ijin usaha, dan lainnya.

3. Layanan Short Course (Training)

Diberikan kepada masyarakat agar pelaku usaha mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang baik di dalam menjalankan aktivitas usahanya, pelatihan diberikan baik yang bersifat by Managerial maupun yang bersifat by Product dan IT.

4. Layanan Sertipikat Massal Swadaya (SMS)

Merupakan layanan pendampingan pengurusan sertifikat massal secara mandiri bagi masyarakat dengan sistem kredit melalui Bank. Prosesnya melalui Bank yang melakukan pembayaran kepada BPN dan selanjutnya masyarakat melakukan pembayaran kredit di Bank yang ditunjukkan.

Semua layanan yang diberikan di Klinik UMKM Kabupaten Jember dampingi oleh Bapak Lukman Ekana Putra selaku konsultan BDS/pendamping UMKM yang berkualitas dan praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Layanan tersebut diberikan pada pelaku UKM yang menjadi binaan Klinik UMKM maupun masyarakat yang memerlukan jasa konsultasi terkait bisnisnya. Adapun UMKM yang menjadi binaan di Klinik UMKM terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 UMKM Binaan Klinik UMKM Kabupaten Jember

No.	Nama UMKM	Bidang Usaha	Dibina Sejak	Masalah
1.	Sentra Genteng	Produksi genteng	2009	Manajemen pembukuan keuangan
2.	Sentra pengrajin tahu tempe	Produksi tahu tempe	2009	-permodalan -bahan baku
3.	Pedagang kaki lima kawasan	Perdagangan	2009	manajemen pembukuan

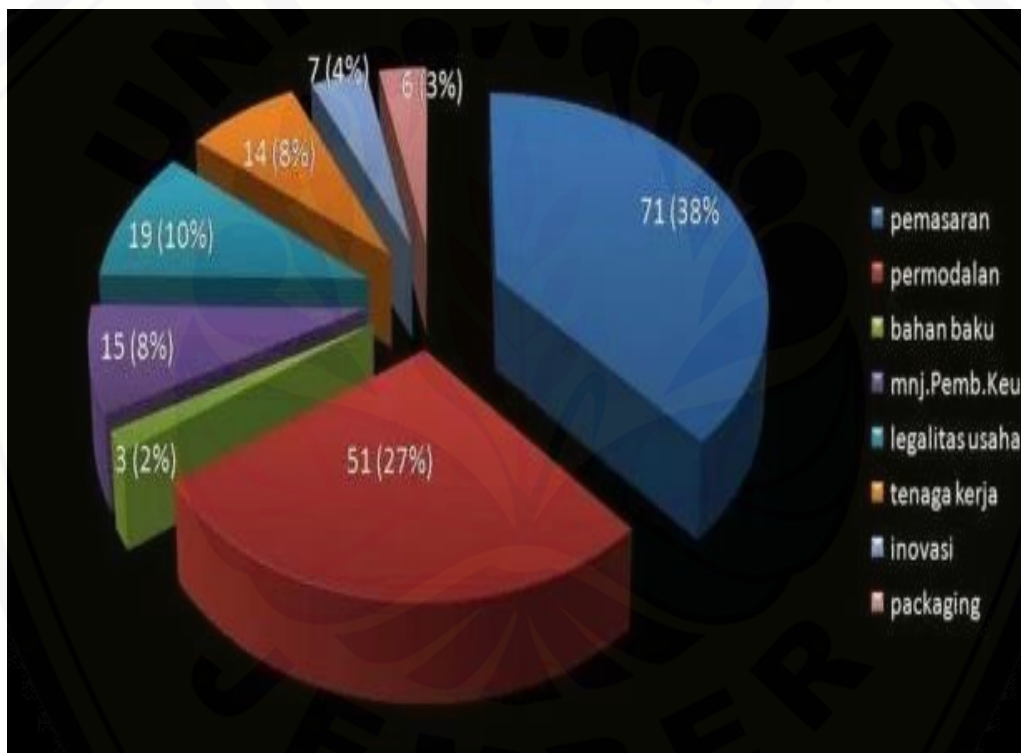
	kampus			keuangan
4.	Kelompok usaha bangunan	Produksi bahan bangunan	2009	-permodalan -pemasaran
5.	Sentra anyaman bambu	Produksi alat rumah tangga/suvenir	2009	-permodalan -pemasaran -Inovasi
6.	Kelompok petani edamame	Agrobisnis	2009	Manajemen bisnis dan keuangan
7.	Sentra tahu tempe	Produksi tahu tempe	2010	-manajemen bisnis
8.	Kelompok nelayan	Penangkapan ikan laut	2010	Permodalan
9.	Kelompok petani edamame	Agrobisnis	2010	Manajemen bisnis dan keuangan
10.	Asamax Chorbina	Pembuatan minuman herbal	2014	-motivasi bisnis -permodalan -legalitas usaha
11.	CV. Titania (titanium series)	Pembuatan pernak-pernik berbahan titanium	2009	-pemasaran -permodalan -legalitas usaha
12.	UD. Warsa Jaya	Pengepul kulit kambing dan sapi	2015	Permodalan -legalitas usaha
13.	Anggun Jaya (sentra meja lukis)	Pembuatan meja lipat	2011	-Permodalan -pemasaran -legalitas usaha

Sumber : Utama Bhakti Consultant, 2016

Berdasarkan pada tabel di atas, UMKM yang menjadi binaan Klinik UMKM yaitu sejak tahun 2009 terdapat 13 UMKM yang mendapat pembinaan dari Klinik UMKM Kabupaten Jember. Pada umumnya permasalahan yang

dihadapi pelaku UMKM menurut Survei Badan Pusat Statistik (BPS) ditemukan berbagai persoalan utama yang dihadapi dan perlu diatasi, yaitu: 1) masalah permodalan, 2) masalah bahan baku, 3) masalah pemasaran, 4) masalah keahlian manajemen dan teknis, 5) masalah kemitraan dan usaha dan persaingan, serta 6) masalah birokrasi dan infrastruktur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkuat dengan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1.1 Frekuensi dan Prosentase Masalah UMKM



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember, 2016

Berdasarkan grafik di atas, permasalahan UMKM yang ada di Kabupaten Jember sebagian besar adalah masalah pemasaran sebesar 38 % menyusul masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah yang terkait permodalan sebesar 27 %, bahan baku sebesar 2 %, manajemen pembukuan keuangan sebesar 8 %, legalitas usaha sebesar 10 %, tenaga kerja sebesar 8 %,

inovasi sebesar 4 %, packaging sebesar 3 %. Data grafik diatas diperkuat dengan data permasalahan UMKM yang dibina di Klinik UMKM Kabupaten Jember sebagai berikut.

Tabel 1.2 Permasalahan UMKM binaan Klinik UMKM Kabupaten Jember 2016

No.	Masalah UMKM	Total UMKM	%
1.	Pemasaran	4	31%
2.	Permodalan	9	69%
3.	Bahan baku	1	8%
4.	Manajemen pembukuan keuangan	5	39%
5.	Legalitas usaha	4	31%
7.	Inovasi	1	8%
8.	Packaging	1	8%

Sumber : Utama Bhakti Consultant (UBC), 2016

Berdasarkan data permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM binaan Klinik UMKM Kabupaten Jember, terdapat empat permasalahan yang sering dihadapi UMKM. *Pertama*, masalah permodalan. Dari 13 UMKM binaan yang mengalami permasalahan permodalan sebanyak 9 UMKM atau sebesar 69%. Pada umumnya UMKM belum melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan keuangan yang dimanajemen dengan baik. Hal ini menjadi penyebab UMKM tidak mempunyai dokumentasi hasil kegiatan UMKM dengan baik. Akibatnya, saat akan mengajukan kredit di lembaga keuangan formal seperti bank, tidak dapat menunjukkan perkembangan hasil usaha. Padahal hal tersebut menjadi salah satu syarat dalam pengajuan kredit di bank. Pelaku UMKM hanya mengandalkan dana pribadi sebagai modal usaha.

Kedua, manajemen pembukuan keuangan. Berdasarkan tabel data jumlah UMKM binaan yang mengalami masalah terkait manajemen bisnis dan keuangan sebanyak 5 UMKM atau 39%.Pengusaha kecil pada umumnya belum melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan keuangan yang dimanajemen dengan baik.Hal ini menyebabkan perusahaan tidak mempunyai dokumentasi informasi kegiatan usaha dengan baik.Akibatnya, pada saat harus berhubungan dengan pihak luar misalnya, seperti pengajuan kredit, tidak dapat menunjukkan perkembangan usaha.

Ketiga, masalah pemasaran. Sebanyak 4 UMKM atau 31% UMKM khususnya yang menjadi binaan di Klinik UMKM beberapa diantaranya mengalami kendala dalam memasarkan hasil industrinya. Hal tersebut mempengaruhi dalam pengembangan UMKM dikarenakan kurang maksimalnya fasilitasi pemasaran hasil produksi UMKM. Selain itu, rendahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menguasai teknologi, informasi dan pasar menjadi salah satu faktor kendala pemasaran. Pemasaran produk yang masih tradisional atau dari mulut ke mulut belum mengandalkan media sosial atau jaringan internet sebagai media pemasaran. Menjadi salah satu penyebab sempitnya akses dalam pemasaran produk UMKM

Keempat, masalah legalitas usaha. Berdasarkan data tabel terdapat empat UMKM atau 31% UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Sebagian besar UMKM juga kurang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam pengurusannya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha sebesar 1.387 unit sedangkan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Jember sebesar 2.410 unit. Dari data tersebut dapat dilihat dari 2.410 unit UMKM hanya 1.387 unit UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Jember sedangkan sebanyak 1.023 unit UMKM masih belum terdaftar (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember, 2017).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku *Consultant Bussines Development Services* (BDS)/pendamping UMKM selaku pelaksana layanan di Klinik UMKM yang ada di Kabupaten Jember peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember masih belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi. Dalam mensosialisasikan pada masyarakat sudah dilakukan melalui media massa, pamflet ataupun radio. Namun, fakta pelaku UMKM yang menjadi binaan di Klinik UMKM tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Jember. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Jember tahun 2016 adalah sebesar 2.410 unit. Akan tetapi, jumlah UMKM yang dibina oleh Klinik UMKM Kabupaten Jember hanya sebanyak 13 UMKM. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Jember.

Kendala yang dihadapi Klinik UMKM dalam menjalankan perannya selain kurangnya sosialisasi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap Klinik UMKM hanya didampingi oleh satu pendamping UMKM/*Consultant Bussines Development Services* (BDS) terkait dengan pembagian kerja hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang dibina di Klinik UMKM. Hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi Klinik UMKM dalam melaksanakan perannya dalam membina UMKM yang ada di Kabupaten Jember.

Menghadapi permasalahan-permasalahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember, maka perlu adanya kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melihat pentingnya pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional juga kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4

Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2011, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah untuk melengkapi peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah ada sebelumnya. Pada pelaksanaan pemberdayaan Koperasi tetap berpegang pada Perda Tahun 2007 No. 4 Tahun 2007, sedangkan pelaksanaan pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah berpegang pada Perda No. 6 Tahun 2011 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Klinik UMKM dalam melaksanakan perannya di Kabupaten Jember dengan judul , “Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berangkat dari suatu masalah. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2012:93), masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah sangat di perlukan untuk merumuskan sebab yang menimbulkan salah penafsiran terhadap masalah penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini “**Bagaimana peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember?**”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas termasuk penelitian memiliki tujuan tertentu, karena tujuan merupakan arah pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian merupakan

rumusan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan adanya tujuan, penelitian dapat lebih terarah. Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan adalah untuk mendeskripsikan peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi civitas akademika Universitas Jember

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya studi tentang peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan, penalaran, dan pengetahuan peneliti melalui aplikasi teori-teori yang di dapatkan di bangku perkuliahan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, informasi serta gambaran bagi pemerintah pusat dan Utama Bhakti Consultant (UBC) mengenai peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu gejala yang diamati. Jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dapat dimulai dengan mengajukan teori tertentu. Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan suatu gejala (dalam Afifudin dan Saebani, 2009:36-37).

Snelbecker (dalam Moleong, 2012:57) menjelaskan teori sebagai berikut,

“ teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.

Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument* sehingga peneliti mempunyai kemampuan untuk menggali informasi secara lengkap, mendalam, dan mampu mengonstruksi temuan-temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Menurut Turner (dalam Sudjana dan Kusumah, 2002:8), teori mengandung empat elemen, yaitu konsep, variabel, pernyataan dan format. Konsep merupakan landasan untuk membangun suatu teori (Soeharto, 1993:73). Tujuan dari konsep adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan berfikir untuk mengkaji masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep yang diantaranya berikut ini:

1. Ilmu Administrasi Negara
2. Konsep Organisasi
3. Peran
4. UMKM

Beberapa konsep dasar tersebut diharapkan dapat membentuk kerangka berfikir peneliti yang dapat mempermudah peneliti menemukan atau suatu permasalahan yang dirumuskan oleh suatu peneliti. Dari konsep diatas menjadi gambaran umum peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember.

2.1 Ilmu Administrasi Negara

2.1.1 Pengertian Ilmu Administrasi Publik

Ada beberapa definisi tentang teori administrasi publik yang diungkapkan oleh beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut.

Menurut Siagian (2001:38) bahwa pengertian administrasi ada dua macam yaitu adminitrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan dengan satu hubungan yang lain. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai dan pemanfaatan dalam berbagai sumber.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa

istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat dan diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang kurang mampu dan harus tunduk terhadap aturan pemerintah.

Menurut Atmosudirjo (1982:272), administrasi publik adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik berhubungan dengan dua orang atau lebih yang bersifat dan membahas kenegaraan dalam suatu perjanjian untuk mengejar tujuan bersama dalam suatu Negara.

Administrasi Negara menurut Pffifner dan Presthus (dalam Syafiie, 2003:31):

1. *Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies;*
2. *Public administration ay be defines as the coordination of individual and group effort to carry out public policy. It manly occupied with the daily work of governments;*
3. *In sum, public administration is a procces concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques large public of people.*

Jadi, menurut Pffiner dan Prethus antara lain sebagai berikut:

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik;
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah;

3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan-pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Nigro dan Nigro (dalam Syafiie, 2003:32):

1. *Public administration is cooperative group effort in public setting;*
2. *Public administration cover all three branches; executive, legislative and judicial, and their interrelationship;*
3. *Public administration has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process;*
4. *Public administration is closely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community;*
5. *Public administration is in different in significant ways from private administration.*

Jadi menurut Nigro bersaudara:

1. Administrasi Negara adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Administrasi Negara meliputi tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan diantara mereka;
3. Administrasi Negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian proses politik;
4. Administrasi Negara sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok dalam menyajikan pelayanan terhadap masyarakat;
5. Administrasi Negara dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Menurut Rasyid (1998:139), administrasi publik sebagai lembaga Negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya. Karena birokrasi publik pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Diadakan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Waldo (dalam Pasolong, 2008:8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas, administrasi Negara/publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah sevara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

2.2 Konsep Organisasi

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerja sama, orang yang bekerja sama dan mencapai tujuan bersama.

Menurut Dimmock (dalam Handayani, 1981:42) menyatakan definisi organisasi sebagai berikut.

“Organisasi adalah perpaduan secara sistematis darpada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan,

koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.”

Dari penjelasan diatas, maka organisasi merupakan sarana atau alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Handyaningrat (1981:43), berdasarkan definisi-definisi diatas menyatakan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya.
4. Adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

Organisasi merupakan elemen penting yang diperlukan di dalam kehidupan manusia. Organisasi membantu kita dalam melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu; dan di samping itu dapat dikatakan organisasi membantu masyarakat; membantu dalam kelangsungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan merupakan sumber penting macam-macam pekerjaan di dalam masyarakat (Winardi, 2003:2).

Organisasi menurut L. Gibson c.s menyatakan bahwa:

“...Organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri.”

Organisasi-organisasi dicirikan oleh perilaku mereka yang di arahkan ke arah pencapaian tujuan. Mereka mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; melalui tindakan individu-individu serta kelompok-kelompok secara terpadu.

Sedangkan menurut (L.F Urwick dalam Winardi, 2003:13) bahwa organisasi-organisasi lebih dari hanya alat untuk menciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi-organisasi menciptakan *setting*, di mana banyak diantara kita melaksanakan proses kehidupan. Sehubungan itu dapat dikatakan organisasi-organisasi menimbulkan pengaruh besar atas perilaku.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa organisasi-organisasi ada, untuk mencapai sesuatu hal. Sesuatu hal tersebut merupakan tujuan-tujuan dan merka biasanya tidak mungkin dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau andaikan andaikan hal itu dapat dicapai individu, lebih efisien dapat dicapai melalui upaya kelompok.

Dari beberapa definisi diatas, organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

2.3 Peran

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kedudukan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukannya, apabila individu telah menjalankan tanggung jawabnya maka dia menjalankan suatu peran. Soekanto (1982:243) menjelaskan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Soekanto menjelaskan tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulannya.

Menurut Toha (1985:13), peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peranan yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pemimpin di tingkat atas menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama.

Konsep tentang peran menurut Komarudin (1994:768) adalah sebagai berikut:

- a. bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Sedangkan definisi peran menurut Usman (2012:60) menyatakan peran adalah sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat. Peran yang melekat dalam diri seseorang memungkinkan seseorang dalam mengekspresikan emosi dan memperlihatkan eksistensinya. Peran telah memungkinkan orang membangun pola tingkah laku dan bersikap, dan di dalam peran juga menentukan strategi bagaimana seharusnya dalam menghadapi berbagai situasi.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang dalam menduduki suatu posisi dalam masyarakat dan serta menjalankan suatu peranan. Peranan menurut Levinson (dalam Soekanto, 1982:244) mencakup tiga hal, yaitu:

- a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan definisi dan konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tingkah laku yang diharapkan sebagai proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok saat menduduki posisi tertentu dalam masyarakat agar sesuai dengan fungsinya. Apabila konsep tersebut diakitkan dengan konsep pemerintah, maka definisi peran adalah adalah proses keterlibatan lembaga pemerintah dalam menjalankan kedudukannya di masyarakat, dalam hal ini adalah Klinik UMKM Kabupaten Jember.

2.3.1 Peran Pemerintah

Ndraha (2003:76) menyatakan bahwa fungsi pemerintah terdiri dari fungsi primer dan yang kedua fungsi sekunder. Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer (biasa disebut fungsi pelayanan/*servicing*) sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Pemerintah memiliki tiga peran dalam melaksanakan pemerintahan , yakni peran mengatur (*regulator*), pemberi layanan (*service provider*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Keban (2008:4-5), menjelaskan bahwa peran regulator mengacu pada peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat, karena masyarakat diasumsikan pihak yang pasif dan kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang telah diatur oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam pengemban pemberi layanan publik, Keban (2008:4-5) menjelaskan bahwa dalam konteks ini pemerintah harus lebih tanggap dan responsive terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan mengetahui dalam pemberian layanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Sedangkan peran pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dijelaskan oleh Keban sebagai upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Akibatnya, masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penelitian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator dan dapat memfokuskan pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

Terkait peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM, menurut David Osborne dan Ted Gaebler organisasi publik dapat menjalankan konsep wirausaha, yang mana dalam konsep *reinventing government* ditawarkan sepuluh prinsip yaitu:

1. Pemerintah dan Birokrasi berperan sebagai katalisator;
2. Pemerintah dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan;

3. Pemerintah dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan;
4. Pemerintah dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan pada pencapaian apa yang merupakan misinya daripada menekankan pada peraturan-peraturan;
5. Pemerintah dan birokrasi hendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik;
6. Pemerintah dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan sendiri;
7. Pemerintah dan birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya;
8. Pemerintah dan birokrasi yang antisipatif;
9. Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan;
10. Pemerintah dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar.

Mengacu pada konsep peran pemerintah diatas, maka peneliti memfokuskan pada peran pemerintah dalam memfasilitasi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Klinik UMKM yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami pengusaha kecil dan koperasi melalui serangkaian pembinaan profesional dan tangguh mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/ 133/ KPTS/013/ 2008 tentang Lembaga Klinik Usaha Kecil dan Menengah Jawa Timur yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Maret 2008.

2.3.2 Peran Klinik UMKM Kabupaten Jember

a. Profil Klinik UMKM

Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur merupakan program yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/ 133/ KPTS/013/ 2008 tentang Lembaga Klinik Usaha Kecil dan Menengah Jawa Timur yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Maret 2008 didirikanlah Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami pengusaha kecil dan koperasi melalui serangkaian pembinaan profesional dan tangguh.

Setiap Klinik UMKM di Kabupaten memiliki pendamping UMKM dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan praktisi yang berpengalaman di bidangnya dalam mobilisasi. *Consultant Business Development Services* (BDS) atau pendamping UKM adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasehat ahli tertentu yang menjalin relasi dengan masyarakat dalam memberikan motivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dan masalah UKM.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka membina dan mengembangkan UMKM yang ada di daerah karena dengan dikelola oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat diharapkan program yang dibuat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Adapun tujuan akhir dari semua ini adalah agar dapat memperkuat perekonomian daerah.

b. Visi dan Misi Klinik UMKM Kabupaten Jember

Adapun visi dan misi Klinik UMKM adalah:

1) Visi

Penyediaan beragam jasa layanan yang berkualitas tinggi guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan mayoritas UMKM

dengan biaya yang ringan dan wajar untuk meningkatkan daya saing dan daya jual produk UMKM dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian daerah.

2) Misi

- a. Mempersiapkan dan mendorong percepatan usaha kecil dan menengah yang tangguh, mandiri dan siap menghadapi pasar global dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui layanan konsultasi, informasi dan advokasi bisnis yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah.
- b. Membantu dan mendorong UKM agar mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri melalui intervensi yang tepat dan relevan.
- c. Penciptaan lapangan kerja dan usaha baru.
- d. Terciptanya jaringan usaha di tingkat nasional dan regional.
- e. Terwujudnya Klinik UKM yang mandiri dan profesional sampai tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pendapatan daerah dan daya saing di daerah.

c. Layanan Klinik UMKM Kabupaten Jember

Klinik UMKM Kabupaten Jember memberikan beberapa layanan diantaranya adalah sebagai berikut:

5. Layanan Konsultasi dan Informasi Bisnis

Merupakan layanan konsultasi secara personal antara konsultan dengan pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM dengan tujuan untuk menemukan masalah yang dihadapi. Konsultan akan membimbing untuk menemukan masalah dan mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang ada sedangkan layanan informasi bisnis

diberikan untuk membantu mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pelaku UKM seperti data base bahan baku, produk perbankan, peluang ekspor, kemitraan, pemasaran, program pemerintah dan lain-lain.

6. Layanan Mediasi Permodalan, Layanan Perijinan dan Advokasi;

Layanan mediasi permodalan merupakan pemberian layanan di bidang permodalan, memberikan informasi kredit, selanjutnya pelaku UKM diarahkan ke perbankan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, mendampingi pengajuan, presentasi dan negosiasi kredit sedangkan layanan perijinan dan advokasi merupakan layanan yang diberikan kepada pelaku UKM yang belum mampu melakukan sendiri aktivitasnya misalnya pembuatan laporan keuangan, pengurusan ijin usaha, dan lainnya.

7. Layanan Short Course (Training)

Diberikan kepada masyarakat agar pelaku usaha mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang baik di dalam menjalankan aktivitas usahanya, pelatihan diberikan baik yang bersifat by Managerial maupun yang bersifat by Product dan IT.

8. Layanan Sertipikat Massal Swadaya (SMS)

Merupakan layanan pendampingan pengurusan sertifikat massal secara mandiri bagi masyarakat dengan sistem kredit melalui Bank. Prosesnya melalui Bank yang melakukan pembayaran kepada BPN dan selanjutnya masyarakat melakukan pembayaran kredit di Bank yang ditunjukan.

d. Sasaran Klinik UMKM:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan peran lembaga dan konsultan BDS sebagai mitra bisnis Klinik UMKM;

hanya berkisar 10 meja lipat. Permintaan konsumen meningkat saat tahun ajaran baru dibuka sedangkan pada hari biasanya permintaan konsumen tidak terlalu tinggi. Pemasaran meja lipat hanya di beberapa tempat saja. Hal tersebut yang mendasari Bapak dan Ibu Sa'id melakukan konsultasi di Klinik UMKM.

4.4.3 Pelaksanaan Layanan Klinik UMKM terhadap Pelaku UMKM

Terdapat empat layanan yang diberikan di Klinik UMKM Kabupaten Jember yaitu layanan konsultasi dan informasi bisnis, layanan mediasi permodalan, layanan perijinan dan advokasi, layanan *short course* (training), dan layanan sertipikat massal swadaya (SMS). Peneliti memilih untuk menjabarkan setiap layanan yang telah diakses oleh empat pelaku UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini. Layanan yang diterima oleh pelaku UMKM disesuaikan dengan permasalahan usahanya. Bapak Lukman selaku Consultant Business Development Services (BDS) akan memberikan pembinaan melalui layanan-layanan yang ada di Klinik UMKM.

Berikut merupakan penjabaran dari setiap layanan yang diterima oleh empat pelaku UMKM yang telah mendapatkan pembinaan dari Klinik UMKM yaitu.

1. Asamax Chorbina

Merupakan layanan konsultasi secara personal antara konsultan dengan pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM dengan tujuan untuk menemukan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Ibu Indarti, layanan yang diakses di Klinik UMKM adalah layanan konsultasi bisnis. Hal ini terkait dengan inisiatif Ibu Indarti untuk membuka usaha di bidang minuman herbal. Sebelum usaha

tersebut direalisasikan, Ibu Indarti melakukan konsultasi dengan Bapak Lukman mengenai usaha yang akan dirintisnya. Ibu Indarti selaku pelaku UMKM memberi pernyataan sebagai berikut,

“Awal mau merintis usaha ini, saya konsultasi dulu sama pak Lukman. Gimana sih biar usaha saya nantinya bisa berkembang, hasil produknya bisa diterima masyarakat. Pak Lukman memberi solusi saya harus melakukan apa biar bisnis saya bisa berkembang dengan baik.” (31 Januari 2017)

Bapak Lukman selaku BDS akan memberikan solusi sesuai dengan kendala yang dihadapi Ibu Indarti. Hal pertama yang dilakukan Bapak Lukman memutuskan apakah bisnis tersebut layak atau tidak layak untuk dilanjutkan, apabila bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan selanjutnya Bapak Lukman mengkaji masalah dan memberikan solusi yang tepat pada usaha yang akan dirintis Ibu Indarti agar dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan pernyataan Ibu Indarti terkait peran Klinik UMKM sebagai berikut,

“Dengan adanya Klinik UMKM dapat memberikan solusi-solusi dalam menghadapi permasalahan yang selama ini menjadi kendala berkembangnya UKM. Terlebih lagi pelayanan gratis yang diberikan Klinik UMKM dalam melayani konsultasi bisnis. Saya dulu sebelum merealisasikan pembuatan minuman herbal melakukan konsultasi bisnis dengan Pak Lukman.” (17 Januari 2017)

Setelah memberikan solusi yang tepat dalam pengembangan bisnis. Selanjutnya tugas Ibu Indarti melaksanakan usahanya sesuai dengan solusi yang diberikan oleh Bapak Lukman. Usaha yang telah dirintis sejak tahun 2014 berkembang pesat hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Ibu Indarti mengembangkan usaha minuman herbalnya sehingga dapat menjadi produsen minuman herbal yang produknya menjadi salah satu perwakilan produk-produk UMKM hasil pembinaan dari Klinik UMKM di Jakarta selain itu banyak

konsumen yang tertarik dengan produk minuman herbalnya karena terbukti dibuat dengan bahan herbal dan tanpa pengawet. Hal ini tidak lepas dari peran yang dilakukan Bapak Lukman selaku BDS dalam memberikan pembinaan pada pelaku UMKM dalam pengembangan UMKMnya.

2. CV. Titania

Bapak Arif merupakan pelaku UMKM yang melakukan konsultasi terkait permodalan dan informasi bisnis di Klinik UMKM. Konsultasi yang dilakukan oleh Bapak Arif mengenai informasi pemasaran. Kendala yang biasanya dihadapi oleh Bapak Arif mengenai pemasaran produk industrinya. Hal tersebut diperkuat wawancara dengan Bapak Arif Susanto selaku pemilik CV. Titania berikut penuturannya,

“Saya sudah delapan tahun menjadi partisipan di UBC. Awal mula saya melakukan konsultasi bisnis terkait bisnis ini. Konsultasi gimana memulai bisnis yang baik dan terkait masalah pemasaran.” (22 Maret 2017)

Permasalahan yang dihadapi Bapak Arif menjadi alasan melakukan konsultasi di Klinik UMKM. Dalam proses konsultasi yang dilakukan dengan Bapak Lukman. Langkah awal dalam menyelesaikan masalah pemasaran yang dialami oleh Bapak Arif yaitu dengan memberikan informasi mengenai pemasaran produknya dengan memberikan informasi yang terkait dengan pangsa industri perhiasan titanium selain itu BDS membantu dalam mempromosikan produk UMKM melalui expo-expo baik di tingkat lokal, regional maupun lokal melalui jaringan BDS seperti Bank Indonesia ataupun Koperasi. Informasi mengenai pemasaran tersebut membantu Bapak Arif dalam menentukan daerah mana saja untuk mendistribusikan hasil industrinya.

Pada awal mulanya, Bapak Arif memasarkan hasil industrinya hanya di seputar daerah Jember dengan membuka outlet di dua perbelanjaan di Kabupaten Jember yaitu di Golden Market dan Matahari.

Setelah mendapatkan informasi pemasaran dari Klinik UMKM, beliau mampu memasarkan hasil industrinya dengan membuka outlet di beberapa tempat seperti salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya dan juga di Bali selain itu produk industri Bapak Arif juga menjadi salah satu percontohan pelaku UMKM yang hasil UMKMnya sering diikuti pameran-pameran yang diadakan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

3. UD. Warsa Jaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan Ibu Devi, kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal. Sistem pembelian kulit kambing dan sapi yang mengharuskan Ibu Devi membeli dalam jumlah banyak dikarenakan permintaan konsumen yang tinggi sedangkan modal untuk membeli kulit kambing dan sapi belum terkumpul. Hal ini yang melandasi Ibu Devi melakukan konsultasi terkait mediasi permodalan. Berikut penuturan Ibu Devi,

“Usaha saya ini sering terkendala modal. Karena sistemnya *mborongya* kadang modalnya belum terkumpul tapi karena pesenan jadi ya harus *kulakan* beli kulit kambing sama sapi di pengepul. Saya konsultasi ke Pak Lukman gimana caranya mengambil kredit di bank lalu di bantu dalam pembuatan proposal.”(24 Maret 2017)

Bapak Lukman selaku pendamping UMKM memberikan penjelasan mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pelaku UMKM yang akan melakukan pengkreditan atau pengajuan modal pada perbankan. Apabila persyaratan pelaku UMKM terpenuhi untuk mengajukan peminjaman di bank. Selanjutnya hal yang akan dilakukan Bapak Lukman selaku BDS dapat dilihat melalui beberapa tahap sebagai berikut;

1. Memberikan informasi kredit;
2. Pelaku UMKM diarahkan ke perbankan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM;

3. Mendampingi pengajuan ke pihak perbankan;
4. Presentasi profil UMKM; dan
5. Negosiasi kredit

Bapak Lukman akan membantu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perbankan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Proses mendampingi pelaku UMKM yang meminta bantuan terkait mediasi permodalan ke perbankan hingga proses akhir yaitu negosiasi kredit. Faktanya masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam pengajuan modal ke perbankan dengan adanya layanan mediasi permodalan, pelaku UMKM dapat terbantu dengan pendampingan oleh BDS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devi setelah mendapat pendampingan dalam pengajuan pengkreditan ke perbankan, beliau memberi pernyataan sebagai berikut,

“Alhamdulillah setelah melakukan pengajuan kredit ke bank dengan di dampingi Pak Lukman, usaha saya tetap bisa berjalan dengan lancar karena punya modal untuk membeli kulit kambing dan sapi.” (24 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti memberikan kesan bahwa layanan mediasi permodalan dengan perbankan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang terkendala dalam permodalan maupun yang akan mengajukan kredit ke perbankan. Proses pendampingan oleh BDS diharapkan mampu mengatasi ketidaktahuan maupun keterbatasan pelaku UMKM dalam proses pengajuan modal atau kredit ke perbankan.

4. Anggun Jaya (Sentra Meja Lukis)

Permasalahan yang dialami Bapak Sa'id selaku pemilik sentra meja lukis mengenai keterbatasan modal dan pemasaran produk. Dalam

mengatasi hal tersebut, Ibu Sa'id melakukan konsultasi bagaimana proses peminjaman modal serta strategi dalam pemasaran di Klinik UMKM. Bapak Lukman selaku BDS akan memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi Ibu Sa'id. Dalam menyelesaikan permasalahan permodalan, Bapak Lukman selaku pendamping UMKM memberikan penjelasan mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pelaku UMKM yang akan melakukan pengkreditan atau pengajuan modal pada perbankan. Pendampingan yang dilakukan oleh Bapak Lukman berkelanjutan hingga pencairan dana di perbankan tercapai.

Bapak dan Ibu Sa'id sangat terbantu dengan mediasi dengan perbankan yang dilakukan oleh Bapak Lukman. Modal yang diajukan disetujui oleh pihak Bank dan dapat dicairkan. Modal tersebut akan digunakan Bapak dan Ibu Sa'id untuk membeli bahan baku meja lipat. Dengan bantuan modal dari Bank secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat kuantitas produksi meja lipat dan berdampak pada peningkatan pendapatan Bapak dan Ibu Sa'id.

Selain mengakses layanan terkait permodalan, Ibu Sa'id juga melakukan konsultasi terkait pemasaran produk usahanya. Bapak Lukman memberikan solusi terkait pemasaran meja lipat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak Lukman ikut mempromosikan terkait produk usaha meja lipat pada tempat-tempat yang membutuhkan meja lipat. Hal itu merupakan salah satu strategi mengatasi masalah pemasaran meja lipat milik Bapak Sa'id.

4.5 Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember

Dalam penjabaran peranan Klinik UMKM di Kabupaten Jember khususnya terhadap pelaku UMKM yang dibina. Berdasarkan tujuan dari dibentuknya Klinik UMKM untuk memberdayakan dan mengembangkan

UMKM dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami pengusaha kecil dan koperasi melalui serangkaian pembinaan profesional dan tangguh, dapat dilihat bagaimana peran Klinik UMKM dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui layanan-layanan yang diberikan di Klinik UMKM dijabarkan melalui beberapa dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang dibina yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Pelaku UMKM

Berdasarkan data hasil penelitian dari setiap UMKM yang mendapatkan layanan di Klinik UMKM. Setiap pelaku UMKM yang mendapatkan pembinaan dari setiap layanan yang diakses merasakan manfaat adanya layanan Klinik UMKM. Peneliti sebelumnya memilih empat pelaku UMKM sebagai informan. Empat pelaku UMKM tersebut mengakses layanan berdasarkan permasalahan yang dihadapi usahanya.

Pembinaan dan pelatihan yang diikuti maupun konsultasi bisnis yang diberikan melalui layanan Klinik UMKM. Pelaku UMKM yang menerapkan materi dari pelatihan-pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan pendapatan perekonomian pelaku UMKM dengan menggunakan layanan yang sudah diberikan *Consultant Bussines Development Services* (BDS). Hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada pelaku UMKM yang dapat dilihat dari meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan ataupun seminar-seminar, semakin luas pemasaran produknya secara otomatis akan menaikkan pendapatan pelaku UMKM.

Peningkatan dalam tingkat ekonomi dalam hal pendapatan dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan pendapatan dari sebelum dan sesudah mengikuti program Klinik UMKM dapat dijelaskan dalam tabel berikut;

Tabel 4.5 Tabel Kenaikan Pendapatan

No.	Nama	Pendapatan per bulan		Total
		Sebelum	Sesudah	
1.	Herbadrink Asamax	1.800.000	3.300.000	5.100.000
2.	CV. Titania	6.800.000	7.400.000	14.200.000
3.	Anggun Jaya	1.700.000	2.500.000	4.200.000
4.	UD. Warsa Jaya	9.00.000	1.250.000	2.150.000
	Total	11.200.000	13.350.000	24.750.000

Sumber : wawancara pelaku UMKM 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan pendapatan dari sebelum dan sesudah mengikuti program Klinik UMKM. Meski kenaikan pendapatan yang diperoleh setiap pelaku UMKM berbeda namun yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah peningkatan penghasilan walau hanya seminimal mungkin.

2. Pelaku UMKM memiliki Legalitas Usaha

SKU digunakan sebagai keterangan usaha skala mikro, kecil dan masyarakat yang memerlukan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang memerlukan seperti pihak perbankan, pegadaian/stakeholder dan lain-lain. Salah satu layanan yang diberikan Klinik UMKM yaitu pendampingan pengajuan SKU ke pihak terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Jember. Pelaku UMKM yang menjadi binaan di Klinik UMKM telah memiliki SKU.

Proses dalam mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU) akan mendapatkan pendampingan dimulai dari pembuatan profil usaha hingga mengarahkan pelaku UMKM ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember guna mengajukan pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU). Berdasarkan hasil wawancara pada empat informan yang menjadi UMKM binaan Klinik UMKM telah memiliki SKU dapat dijelaskan dalam tabel berikut;

Tabel 4.6 Pelaku UMKM yang memiliki SKU

No.	Nama UMKM/Sentra	Surat Keterangan Usaha (SKU)	
		Sebelum dibina	Sesudah dibina
1.	Herbadrink Asamax	Belum memiliki SKU	Memiliki SKU
2.	CV. Titania	Belum memiliki SKU	Memiliki SKU
3.	Anggun Jaya	Belum memiliki SKU	Memiliki SKU
4.	UD. Warsa Jaya	Belum memiliki SKU	Memiliki SKU

Sumber : wawancara pelaku UMKM, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan terdapat pembinaan yang dilakukan Klinik UMKM guna meningkatkan kualitas UMKM melalui pendampingan pelaku UMKM dalam pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU). Seperti yang diketahui legalitas usaha digunakan apabila pelaku UMKM akan melakukan peminjaman modal atau pengkreditan ke perbankan. Apabila pelaku UMKM sudah memiliki daftar industri akan mempermudah proses pengajuan modal ke perbankan. Berikut merupakan contoh SKU yang dimiliki pelaku UMKM,



Gambar 4.7 Surat Keterangan Usaha (SKU), (Sumber : bapak Sa'id, 2017)

3. Manajemen Keuangan yang tertata dengan baik (*bankable*)

Salah satu kendala yang dialami pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan yang belum tertata dengan baik (*unbankable*). Pencatatan serta pelaporan keuangan yang belum di manajemen dengan baik menyebabkan UMKM tidak memiliki dokumentasi informasi kegiatan dengan baik. Akibatnya, pada saat pelaku UMKM akan mengajukan peminjaman ke perbankan akan kesulitan dikarenakan salah satu syarat dari perbankan dalam pengajuan modal atau pengkreditan adalah laporan keuangan yang jelas dan tertata dengan baik. Selain itu, akan mengakibatkan pelaku UMKM tidak dapat menunjukkan perkembangan usahanya.

Pemberian pelatihan terkait manajemen pengelolaan keuangan yang diberikan di Klinik UMKM. Meningkatkan pengetahuan pelaku

UMKM dalam mengelola laporan keuangan dan usahanya melalui pencatatan laporan yang telah tertata dengan baik (*bankable*). Berdasarkan hasil wawancara dengan empat pelaku UMKM yang telah dibina oleh Klinik UMKM diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut,

Tabel 4.7 Manajemen Keuangan Pelaku UMKM

No.	NamaUMKM/ Sentra	Manajemen Keuangan	
		Sebelum dibina	Sesudah dibina
1.	Herbadrink Asamax	Belum tertata dengan baik (<i>unbankable</i>)	Sudah tertata dengan baik (<i>bankable</i>)
2.	CV. Titania	Belum tertata dengan baik (<i>unbankable</i>)	Sudah tertata dengan baik (<i>bankable</i>)
3.	Anggun Jaya	Belum tertata dengan baik (<i>unbankable</i>)	Sudah tertata dengan baik (<i>bankable</i>)
4.	UD. Warsa Jaya	Belum tertata dengan baik (<i>unbankable</i>)	Sudah tertata dengan baik (<i>bankable</i>)

Sumber : wawancara pelaku UMKM, 2017 (diolah)

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelatihan terkait pelatihan manajemen keuangan berdampak pada sistem pengelolaan pelaporan keuangan yang jelas dan tertata dengan baik.

Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kualitas UMKM dari manajemen keuangan yang belum tertata dengan baik (*unbankable*) menjadikan pelaku UMKM dapat memanajemen keuangan dengan baik (*bankable*).

4.6 Analisis Peran Klinik UMKM

Peranan pemerintah dewasa ini makin besar bahkan di negara-negara yang menganut kebebasan dan inisiatif usaha swasta. Peranan pemerintah semakin luas sebagaimana dilihat dari pemberian layanan umum oleh dinas-dinas pemerintah yaitu mengatur, mendorong, mengkoordinir, bahkan membiayai usaha pihak swasta maupun daerah. Menurut Labolo (2010:29), peranan pemerintah sebagai pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh laba atau profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri.

Pada literatur administrasi publik dijelaskan pula bahwa pemerintah memiliki tiga peran dalam melaksanakan pemerintahan, yakni peran mengatur (*regulator*), pemberi layanan (*service provider*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Menurut Keban (2008:4-5) menjelaskan bahwa peran regulator mengacu pada peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam pemberian layanan publik diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah ditetapkan. Pelayanan publik (*service provider*) merupakan

perwujudan dari fungsi aparaturnya Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara. Sedangkan menurut Ndraha (2010:36), peran pemberdayaan (*empowerment*) sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang masyarakat tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dikarenakan masih lemahnya dan tidak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Tujuan dari pemberdayaan adalah memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penelitian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

4.6.1 Analisis Peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember

Dalam penjabaran mengenai peranan pemerintah yang dijabarkan di atas, peneliti menemukan peran Klinik UMKM sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan masyarakat terutama bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Jember. Berdasarkan tujuan dari dibentuknya Klinik UMKM berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/ 133/ KPTS/ 013/ 2008 yaitu untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pengusaha kecil dan koperasi melalui serangkaian pembinaan profesional yang tangguh.

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan melalui serangkaian layanan-layanan yang ada di Klinik UMKM dilaksanakan untuk meminimalisir permasalahan yang ada seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya informasi pemasaran, masalah perijinan usaha dan lain-lainnya. Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada pelaku UKM, dibentuklah Klinik UMKM di Kabupaten Jember guna membantu pelaku UKM meningkatkan kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti peran dari Klinik UMKM yang terdapat di Kabupaten Jember memiliki peranan yang sangat besar dalam mengembangkan dan memajukan UMKM di Kabupaten Jember. Penelitian yang dilakukan pada beberapa pelaku UMKM binaan Klinik UMKM menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi pelaku UMKM sebelum dan sesudah dibina di Klinik UMKM. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Klinik UMKM dilaksanakan melalui layanan-layanan yang terdapat di Klinik UMKM. Layanan yang diberikan di Klinik UMKM di dampingi oleh *Consultant Business Development Services* (BDS) atau pendamping UMKM. Pelaku UMKM akan mendapatkan layanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.

Layanan-layanan yang diberikan di Klinik UMKM Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut.

1. Layanan konsultasi dan informasi bisnis;
2. Layanan mediasi permodalan, layanan perijinan dan advokasi;
3. Layanan *Short Course* (training);
4. Layanan Sertipikat Massal Swadaya (SMS).

Layanan-layanan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Setiap pelaku UMKM mengalami permasalahan yang berbeda-beda oleh sebab itu akan mendapatkan penanganan sesuai dengan permasalahannya. Pelaku UMKM akan di dampingi oleh BDS hingga permasalahannya yang dihadapi pelaku UMKM dapat terselesaikan. Keaktifan pelaku UMKM juga berperan penting dalam kemajuan usahanya. Sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik antara pelaku UMKM dengan BDS.

Peran dari Klinik UMKM di Kabupaten Jember berdampak pada kehidupan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat terlihat pelaku UMKM yang dibina mendapatkan solusi dari permasalahan

UMKMnya. Selain itu beberapa pelaku UMKM merasakan dampak dengan adanya Klinik UMKM di Kabupaten Jember sebagai berikut;

1. peningkatan pendapatan pelaku UMKM;
2. pelaku UMKM memiliki legalitas usaha;
3. manajemen keuangan yang tertata dengan baik.

Adanya Klinik UMKM di Kabupaten Jember membantu pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang di Kabupaten Jember. Meskipun dalam pelaksanaannya masih belum merata. Hal tersebut dapat terlihat masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang adanya Klinik UMKM di Kabupaten Jember. Padahal Klinik UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan UMKM melalui pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui layanan-layanan yang berkualitas.

Berdasarkan penjabaran mengenai peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember sesuai dengan tujuan dibentuknya Klinik UMKM yaitu membina dan memberdayakan UMKM melalui serangkaian layanan profesional dan tangguh. Layanan-layanan yang ada di Klinik UMKM diberikan pada pelaku UMKM ataupun masyarakat yang membutuhkan solusi serta penanganan masalah yang dialami seputar permasalahan UMKM. Peran Klinik UMKM yang strategis dalam menangani permasalahan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perannya melalui layanan-layanan yang diberikan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai peran Klinik UMKM di Kabupaten Jember sesuai tujuan dari dibentuknya Klinik UMKM berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/ 133/ KPTS/ 013/ 2008 yaitu untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Klinik UMKM dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM yang terdapat di Kabupaten Jember merupakan solusi dalam mengantisipasi keterbatasan model pembinaan yang dilakukan pemerintah hanya sebatas memberikan pelatihan saja, namun di Klinik UMKM mampu memberikan pelatihan sekaligus solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Hal tersebut dapat terlihat melalui layanan-layanan yang terdapat di Klinik UMKM sebagai bentuk dari pelayanan yang diberikan terhadap pelaku UMKM. Layanan-layanan yang terdapat di Klinik UMKM adalah sebagai berikut.
 5. Layanan konsultasi dan informasi bisnis;
 6. Layanan mediasi permodalan, layanan perijinan dan advokasi;
 7. Layanan *Short Course* (training);
 8. Layanan Sertipikat Massal Swadaya (SMS).
2. Peran Klinik UMKM dalam mengembangkan dan memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Jember dapat terlihat melalui perubahan kehidupan pelaku UMKM, dilihat dari dua aspek yaitu ekonomi dan kualitas dari UMKM. Perubahan yang terjadi pada pelaku UMKM setelah dibina oleh Klinik UMKM dalam peningkatan pendapatan pelaku UMKM, pelaku UMKM

memiliki legalitas usaha, dan pengelolaan manajemen keuangan yang tertata dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman peneliti selama berada di lokasi penelitian yang berkaitan tentang peran Klinik UMKM bagi pelaku UMKM di Kabupaten Jember, maka peneliti mengemukakan beberapa saran untuk Klinik UMKM di Kabupaten Jember. Adapun saran tersebut adalah.

1. Peran pemerintah maupun pelaksana kebijakan yang terkait dalam mensosialisasikan program Klinik UMKM di Kabupaten Jember perlu ditingkatkan intensitasnya dikarenakan manfaat yang besar bagi masyarakat untuk mengetahui fungsi dari Klinik UMKM.
2. Payung hukum terkait UMKM perlu diperkuat baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah. Dikarenakan Peraturan Daerah yang menangani terkait UMKM tidak ada sehingga dalam pengembangan UMKM masih belum menjadi prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin & Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Anoraga, P & Sudantoko, D. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, Slamet P. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Creswell, J. W . 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Jogjakarta: Gava Media.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan baru) 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pitriyani, Hj. 2010. *Manajemen Usaha Kecil Menengah. Jember: Center for Society Studies (CSS) .*
- Rohman, Hermanto. 2009. *Monitoring dan Evaluasi: Media Pembelajaran Pengamatan di Lapangan Jember: Program Studi Ilmu Administrasi*

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Jember.
Booklet materi kuliah

Ryass, Rasyid. 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta:LP3ES

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama

Soeharto, Bohar. 1993. *Petunjuk Praktis Mengenai: Pengertian Fungsi-Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah (Makalah-Skripsi-Thesis) Ilmu Sosial*. Bandung: Tarsito Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara Cempaka.

Taliziduhu, Ndraha. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rinka Cipta

Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia; Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES .

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Usman, H & Akbar , P. S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

Skripsi

Fauziah, Ni'matul. 2013. *Komunikasi Konsultasi Bisnis (Studi pada Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jurnal dan Artikel

(http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/2014_kajian_pkem_Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf).

<http://wartametropolis.com/2012/09/klinik-koperasi-dan-umkm-jawa-timur-sebuah-solusi/>)

<http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcepuk/gambar/file/ZUDIKA.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah

Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/ 133/ KPTS/ 013/ 2008 tentang Lembaga Klinik Usaha Kecil dan Menengah Jawa Timur

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Internet

<http://kbbi.web.id/program>

<https://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/>